

JURNAL INTEGRITAS SERASAN SEKUNDANG
(Integrity Journal of Serasan Sekundang)

Terbit setahun sekali pada bulan Desember. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian di bidang sosial, ekonomi, teknologi, inovasi, pemerintahan & pembangunan

Ketua Dewan Redaksi	: Tarmizi Ismail, SE, M.Si
Manajer Jurnal	: HeidiYurismasari,SE
Dewan Redaksi	: Sukiani, SE H.Haris Munandar, SE, M.Si Yusnawati, S.Pd Loehalni Agoestirinirini, S.P, M.Si, M.M
Mitra Bestari/Peer Reviewer	: Prof Dr. Kgd Muhammad Sobri, M.Si Prof.H. Syamsurijal, AK, Ph.D Prof Dr. H.Aflatun Muchtar, M.A Dr. Ir.Erizal Sodikin Dr. Muhammad Uyun Hj. Rita Kamalia, S.K.M M.Kes Emiyati, SE, M.Si Drs.H. Fajeri Erham, M.M H. Zulkarnain, S.Kom H. Syachril, S.H, M.Si, M.H.I Dr. Azwardi, Dr. H.Hardiansyah, M.Si Dr. Maulana Dr. Riswani, S.P, M.Si Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP, M. AP
Editor	: Taufik Firdaus Nanda Azwaza Firsya Sendika R.Manto, S.Kom
Asisten Redaksi	: Ester Claudya Damayanti, ST, M.Eng Yulia Fitriani, S.Hum Muhammad Teguh, SP, MM Yulia Anita, SE Efran Fauzan, SE Desfa Gempata Marsa Saisan, S.Pi Sagita Desta Ria, S.Ip Ahmad Saleh Mukarom, SH

Alamat Penyunting dan Tata Usaha
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Muara Enim
Jl. Mayor H. Tjiek Agus Kiemas, SH Kompleks Islamic Center Kode Pos 31311 Sumatera Selatan
Telepon: 0734-7420025 Fax : 0734-7420025 Email : balitbangda@muaraenimkab.go.id
Website: www.balitbangda.muaraenimkab.go.id

Jurnal Integritas diterbitkan sejak bulan Desember 2019 oleh Badan Penelirian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

Penyunting menerima naskah sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan di media lain. Naskah diketik di atas kertas A4 spasi tunggal sepanjang ± 20 halaman dengan format seperti tercantum pada halaman kulit dalam belakang (Pedoman Bagi Penulis) . Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah, dan tatacara lainnya

JURNAL INTEGRITAS SERASAN SEKUNDANG
(Integrity Journal of Serasan Sekundang)

DAFTAR ISI

	Halaman
Redaksi	1
Daftar Isi	2
Kata Pengantar	3
Jurnal Rencana Aksi pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)di Kabupaten Muara Enim Oleh Tarmizi Ismail, ¹ Sukiani, ² Azwardi, Sukanto, ² Abdul Bashir, ¹ Sagita Desta Ria	4-28
Jurnal Peran Komite Dalam Pembangunan Sarana Prasarana SMPN 1 Banyuasin 2 Kabupaten Banyuasin Oleh Jamaluddin Maulana	29-40
Jurnal Kajian Simbol Budaya Muara Enim Oleh Sardin, Nike Kamarubiani, Uyu Wahyudin, Arvian Triantoro, Ayo Sunaryo	41-68
Jurnal Kecurangan Akademik Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Berdasarkan Scale Self-Reporting Cheating Scale Oleh Muhamad Uyun	69-90
Jurnal Kajian Evaluasi Kinerja Pelayanan Terminal Alang Alang Lebar Provinsi Sumatera Selatan Oleh Desi Ariania, Maulana	91-105

Kata Pengantar

Pembaca yang budiman.

Alhamdulillah Puji syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya Jurnal Integritas Serasan Sekundang (JISS) Volume 03 Nomor 01, Tahun 2023 dapat diterbitkan. JISS adalah terbitan perdana pada tahun 2019 dan telah terakreditasi LIPI dengan Nomor : JISS dengan ruang lingkup fokus yaitu Kajian Praktisi-Akademis, Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan dan Teknologi.

Tulisan yang dimuat pada JISS semuanya telah diseleksi, ditelaah dan di-review oleh Dewan Redaksi dan Mitra bestari yang kompeten di bidangnya. Tulisan-tulisan yang berkualitas baik dan sesuai dengan ruang lingkup JISS saja yang dapat diterbitkan. Penerbitan JISS Volume 03, Nomor 01 Tahun 2021 menyajikan 5 artikel yang terdiri dari 1 tulisan tentang Pariwisata, 2 tulisan tentang pendidikan, 1 tulisan Pemerintahan dan 1 tulisan Budaya.

JISS diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata untuk pengembangan Industri nasional, khususnya di bidang agroindustri. JISS diharapkan juga mampu menjadi motivasi bagi para peneliti, perekayasa, dosen.

Dewan redaksi menyampaikan terima kasih kepada penulis, mitra bestari dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang terlibat dalam penerbitan JISS pada Volume 03 Nomor 01 Tahun 2021. Akhirnya, kami mengundang peneliti, perekayasa, praktisi dan mahasiswa mengirimkan naskah untuk diterbitkan di JISS. Kami menerima saran dan kritik yang membangun dari pembaca, pelanggan dan para pihak lain demi peningkatan kualitas JISS.

Selamat membaca.

Muara Enim, Desember 2021
Ketua Dewan Redaksi

M. Tarmizi Ismail, S.E., M.S.i

JURNAL INTEGRITAS SERASAN SEKUNDANG (JOURNAL INTEGRITATION SERASAN SEKUNDANG)	
p-ISSN e-ISSN	Vol, 03, No. 01, 2021
ABSTRAK	
RENCANA AKSI PENGEMBANGAN PARIWISATA MELALUI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN MUARA ENIM	
¹Tarmizi Ismail, ¹Sukiani, ²Azwardi, Sukanto, ²Abdul Bashir, ¹Sagita Desta Ria ¹ Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan ² Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Palembang Sumatera Selatan	
ABSTRAK	
<p>Tujuan studi untuk Rencana Aksi pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Muara Enim. Metode yang digunakan berupa mixed method dengan analisis minimum yaitu analisis kuantitatif yang didukung analisis kualitatif deskriptif. Adapun dua pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu pertama, pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil studi ini menunjukkan prioritas produk UMKM yang mendorong pengembangan pariwisata adalah industri kreatif kuliner dan kerajinan tangan. Kedua jenis produk ini melibatkan partisipasi masyarakat sehingga keberlangsungannya dapat terjamin. Selain itu, Kabupaten Muara Enim memiliki potensi desa wisata yang telah mendapat pendampingan pihak ketiga sehingga implementasi pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat terwujud. Temuan lain dari studi ini juga menunjukkan bahwa Regulasi (peraturan pemerintah daerah) dan Kelompok Sadar Wisata berpengaruh besar terhadap keberadaan desa wisata namun berdampak kecil. Sementara itu, infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, keberadaan objek wisata dan promosi, logistik (travel agen, homestay, tiket) memiliki pengaruh dan dampak besar terhadap perkembangan desa wisata.</p>	
Kata kunci: Rencana aksi, Pariwisata, Pemberdayaan, UMKM	
ABSTRACT	
<p><i>The study makes the Action Plan for tourism development through empowering Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Muara Enim Regency. The method used is a mixed-method with a minimum analysis that is quantitative analysis supported by descriptive qualitative analysis. The two approaches used in this activity are first, the Analytical Hierarchy Process (AHP) approach. The results of this study show that the priority of MSME products that encourage tourism development is the culinary and handicraft creative industries. Both types of products involve community participation so that its sustainability can be guaranteed. In addition, Muara Enim Regency has the potential of a tourism village that has received third party assistance so that the implementation of sustainable tourism development can be realized. Other findings from this study also show that local government regulations and the Tourism Awareness Group have a big influence on the existence of a tourism village but with little impact. Meanwhile, infrastructure, the quality of human resources, the existence of attractions and promotions, logistics (travel agents, homestays, tickets) have a great influence and impact on the development of tourism villages.</i></p>	
Keywords: Action plan, Tourism, Empowerment, MSMEs	

1. PENDAHULUAN

Sektor pariwisata dan industri terutama UMKM merupakan salah satu komponen dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan pariwisata dan UMKM harus dilakukan secara berkelanjutan sehingga memberikan manfaat langsung untuk kesejahteraan masyarakat. Sektor pariwisata mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja dan menjadi multiplier effect untuk pengembangan sektor perekonomian yang lain.

Kabupaten Muara Enim merupakan sebuah wilayah yang diberkahi oleh lingkungan alam yang indah dan yang memiliki potensi pariwisata yang memikat, baik yang telah terorganisir dengan baik maupun yang belum di rambah. Sektor pariwisata dapat menjadi salah satu potensi unggulan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai berkembangnya sektor lain, diantaranya Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

UMKM sebagai penyangga perekonomian mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan daerah. Selain itu, UMKM juga dapat berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, serta mendorong peningkatan distribusi hasil-hasil pembangunan daerah.

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Muara Enim dapat menjadi salah satu program dalam menciptakan lapangan pekerjaan tanpa harus mempunyai jenjang pendidikan dan keahlian khusus.

Pengembangan UMKM dan potensi

yang terdapat di Kabupaten Muara Enim diharapkan dapat mendorong sektor pariwisata di Kabupaten Muara Enim, karena dapat memberikan daya tarik pada sektor pariwisata di Kabupaten Muara Enim. Potensi sektor pariwisata yang terdapat di Kabupaten Muara Enim terdiri dari wisata air terjun dan wisata lainnya yang berkembang di wilayah dataran tinggi Semende, serta Desa Kayu Ara Sakti Gunung Megang yang saat ini telah dikembangkan untuk menjadi salah satu potensi pariwisata.

Selain itu, produk unggulan yang menjadi ciri khas di Kabupaten Muara Enim yang tersebar di berbagai Kecamatan seperti Kerupuk Kemplang, Telor Asin, Kopi Semende, Minuman Jahe Merah, Kerajinan Tangan, Ayam, Kain Batik dan lain-lain. Berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah Kabupaten Muara Enim menunjukkan bahwa selama periode 2014-2018 pertumbuhan UMKM mencapai 5.45 persen. Menurut sebarannya, jenis usaha yang tumbuh cukup tinggi adalah usaha mikro sebesar 6.19 persen. Untuk usaha kecil hanya tumbuh 0.30 persen dan usaha menengah tidak mengalami perubahan. Secara umum permasalahan yang di hadapi UMKM antara lain (1) produk belum dapat bersaing dipasaran baik kualitas maupun kuantitas; (2) masih terbatasnya akses permodalan; (3) minimnya pemanfaatan teknologi bagi pengembangan UMKM; dan (4) sentra-sentra produksi Industri UMKMK belum tertata dan belum terbentuk secara optimal dalam kelompok-kelompok usaha bersama.

Tabel 1.1. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Muara Enim Tahun 2014-2018

Jenis usaha	Tahun					Pertumbuhan (%)
	2014	2015	2016	2017	2018	
Usaha Mikro	3.525	3.550	3.973	4.648	4.760	6,19
Usaha Kecil	530	535	535	535	538	0,30
Usaha Menengah	38	38	38	38	38	0,00
Total	4.093	4.123	4.546	5.221	5.336	5,45

Pada 2018 sebaran UMKM di Kabupaten Muara Enim masih didominasi oleh usaha mikro sebanyak 4.760 unit usaha (89.21 %), usaha kecil sebanyak 538 unit usaha (10.08 %), dan usaha menengah sebanyak 38 unit usaha (0.71 %). Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui OPD terkait seperti pemberdayaan dengan dukungan program CSR (corporate social responsibility), perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat maupun perorangan dirasakan masih belum optimal.

Pada kenyataannya berbagai upaya tersebut bejalan sendiri-sendiri, tidak terpandu dan tidak merata ke seluruh wilayah atau jenis usaha. Sehingga, beberapa unit UMKM mendapatkan pembinaan yang intensif dan mendapatkan bantuan fasilitas, peralatan dan kesempatan promosi dalam pameran sehingga mudah dikenal masyarakat disisi lain masih banyak UMKM yang belum tersentuh dan mendapatkan bantuan fasilitas, peralatan dan lainnya. Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, maka diperlukan penyusunan perencanaan aksi pengembangan wisata melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Muara Enim.

Pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan UMKM di Kabupaten

Muara Enim adalah suatu kegiatan yang melakukan identifikasi permasalahan dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Muara Enim dengan melibatkan stakeholder di Kabupaten Muara Enim melalui pembentukan kelompok kerja. Dari hasil kelompok kerja mengkaji Produk UMKM ini akan dipetakan dan diinventarisir permasalahan di beberapa wilayah yang memiliki potensi Pariwisata yang selanjutnya memberdayakan UMKM sekitar.

Peta/inventarisir permasalahan ini selanjutnya akan disusun roadmap/rencana aksi yang akan disusun dalam kegiatan ini untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terinventarisir. Diharapkan dengan adanya roadmap/rencana aksi ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya pariwisata melalui pemberdayaan UMKM.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Penyusunan Roadmap/Rencana Aksi pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan UMKM di Kabupaten Muara Enim antara lain sebagai berikut:

- (1) Kondisi Pariwisata dan UMKM lingkup Kabupaten Muara Enim;
- (2) Program/kegiatan yang telah dilakukan oleh OPD terkait dan BUMD/BUMS serta UMKM lingkup

Kabupaten Muara Enim;

- (3) Rencana Aksi *Stakeholder* terkait untuk merencanakan program/kegiatan jangka waktu 5 tahun kedepan dalam rangka pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan UMKM di Kabupaten Muara Enim;
- (4) Desain pilot project Kecamatan/ Desa "Pengembangan Pariwisata dengan Memberdayakan UMKM" di Kabupaten Muara Enim;
- (5) Pencanaan komitmen bersama stakeholder terkait dalam rangka percepatan pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan UMKM di Kabupaten Muara Enim;
- (6) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Kecamatan / Desa yang menjadi Pilot Project.

2.2 Metode

Metode yang digunakan berupa *mixed method* dengan analisis minimum yaitu analisis kuantitatif yang didukung analisis kualitatif deskriptif. Adapun dua pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu *pertama*, pendekatan *Analytical Hierarchy Process* (AHP), metode ini untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks tidak terstruktur kedalam beberapa komponen dalam susunan yang hirarki, dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif, dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Peralatan utama *Analytical Hierarchy Process* (AHP) adalah memiliki sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Dengan hirarki, suatu masalah kompleks dan tidak terstruktur dipecahkan ke dalam kelompok-kelompoknya dan diatur

menjadi suatu bentuk hirarki. *Kedua*, pendekatan SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk menginventarisir situasi internal dan eksternal seperti Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunities (kesempatan), dan Threats (ancaman). Selanjutnya membuat strategi yang dapat dilakukan seperti:

- (1) Strategi S-O (*Strength-Opportunity*), menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengambil peluang yang ada;
- (2) Strategi S-T (*Strength-Threat*), menggunakan kekuatan untuk menghindari dan mengatasi ancaman;
- (3) Strategi W-O (*Weakness-Opportunity*), menggunakan peluang yang dimiliki untuk mengatasi kelemahan;
- (4) Strategi W-T (*Weakness-Threat*), berupaya meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

Selain itu dilakukan pula pemetaan potensi pariwisata dengan mendorong berkembangnya UMKM. Pemetaan dilakukan dengan ArGIS sehingga terlihat secara jelas potensi desa yang dijadikan unggulan. Desa-desa yang memiliki keunggulan menurut data Rumah Gerbang Serasan sebanyak 15 desa yang tersebar di 7 Kecamatan. Pemilihan 15 desa dengan pertimbangan adanya aspek keberlanjutan, desa-desa tersebut telah didampingi pihak ketiga dalam pengembangan produk-produk lokal.

Setelah ditemukan potensi pariwisata dan produk unggulan di desa wisata, analisis dilanjutkan dengan melihat faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap pengembangan desa wisata. Pemetaan terhadap pengaruh dilakukan dengan Program Micmac. Pengaruh dan dampak dari setiap faktor dipetakan dalam empat

kuadran, sebagai berikut:

Pengaruh	Pengaruh Besar dan Dampak Kecil	Pengaruh Besar dan dampak Besar
	Pengaruh Kecil dan Dampak Kecil (outonomous)	Pengaruh Kecil dan Dampak Besar
Ketergantungan		

Sumber data dalam kajian ini diperoleh dari observasi lapangan dan *Focus Group Discussion*. Selain itu, data pendukung dan informasi penunjang evaluasi bersumber dari Badan Pusat Statistik. Stakeholder daerah yang di libatkan dalam kegiatan Penyusunan Rencana Aksi pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan UMKM di Kabupaten Muara Enim.

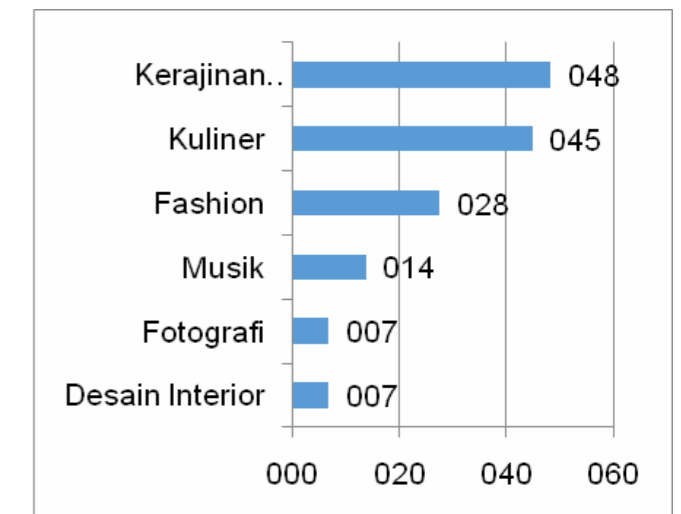
1. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. ANALISIS AHP

Hasil identifikasi yang telah dilakukan melalui pendekatan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dalam menentukan prioritas pengembangan UMKM di bidang industri kreatif di Kabupaten Muara Enim terbagi dalam tiga prioritas yaitu (1) pengembangan prioritas industri kreatif dalam jangka pendek; (2) pengembangan prioritas ndustri kreatif dalam jangka menengah; (3) pengembangan prioritas industri kreatif dalam jangka panjang. Adapun hasil penentuan prioritas pengembangan UMKM di bidang industri kreatif di Kabupaten Muara Enim di sajikan pada analisis sebagai berikut :

A.1. Prioritas Jangka Pendek

Hasil dari perhitungan bobot AHP berdasarkan peringkat untuk pengembangan potensi dalam jangka pendek pada industri kreatif di Kabupaten Muara Enim menunjukkan bahwa ada empat dari enam industri kreatif yang memiliki bobot lebih dari 25 persen yaitu unit usahakerajinan tangan songket dengan bobot sebesar 48.28 persen, di ikuti unit usahakuliner sebesar 44.83 persen, dan unit usaha fashion sebesar 25.59 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam jangka pendek pemberdayaan UMKM (industri kreatif) yang prioritas dalam mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Muara Enim unit usaha kuliner, kerajinan tangan songket, desain interior, dan unit usaha fashion.

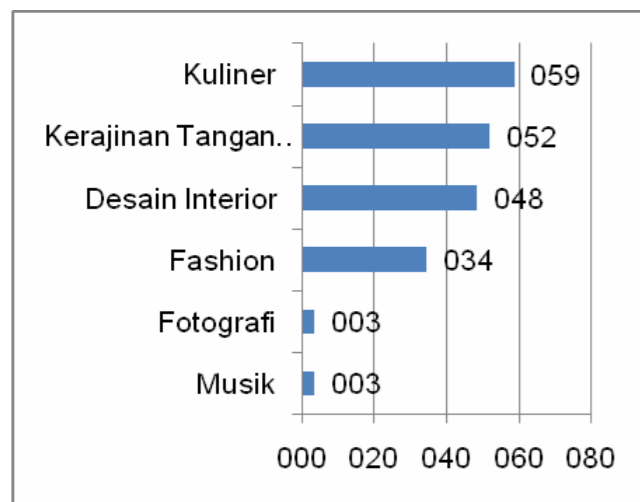


Gambar 1. Pengembangan Potensi Industri Kreatif dalam Jangka Pendek di Kabupaten Muara Enim

A.2. Prioritas Jangka Menengah

Hasil dari perhitungan bobot AHP berdasarkan peringkat untuk pengembangan potensi dalam jangka

pendek pada industri kreatif di Kabupaten Muara Enim menunjukkan bahwa ada empat dari enam industri kreatif yang memiliki bobot lebih dari 25 persen yaitu unit usaha kuliner dengan bobot sebesar 56.62 persen, di ikuti unit usaha kerajinan tangan songket sebesar 51.72 persen, desain interior sebesar 48.28 persen, dan unit usaha fashion sebesar 34.48 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam jangka pendek pemberdayaan UMKM (industri kreatif) yang prioritas dalam mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Muara Enim unit usaha kuliner, kerajinan tangan songket, desain interior, dan unit usaha fashion.

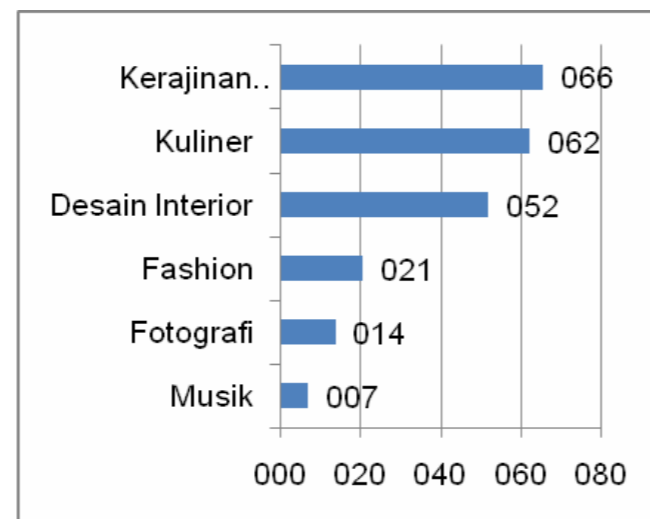


Gambar 2. Pengembangan Potensi Industri Kreatif dalam Jangka Menengah di Kabupaten Muara Enim

A.3. Prioritas Jangka Panjang

Hasil dari perhitungan bobot AHP berdasarkan peringkat untuk pengembangan potensi dalam jangka pendek pada industri kreatif di Kabupaten Muara Enim menunjukkan bahwa ada empat dari enam industri kreatif yang memiliki bobot lebih dari 25 persen yaitu unit usaha kerajinan tangan songket dengan bobot sebesar 65.52

persen, di ikuti unit usaha kuliner sebesar 62.07 persen, dan desain interior sebesar 51.72 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam jangka pendek pemberdayaan UMKM (industri kreatif) yang prioritas dalam mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Muara Enim unit usaha kuliner, kerajinan tangan songket, desain interior, dan unit usaha fashion.



Gambar 3. Pengembangan Potensi Industri Kreatif dalam Jangka Panjang di Kabupaten Muara Enim

A.4. Aspek Permasalahan Pengembangan Pariwisata

Hasil identifikasi aspek permasalahan pengembangan pariwisata dalam mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Muara Enim dapat inventarisir dalam 15 (limabelas) aspek antara lain:

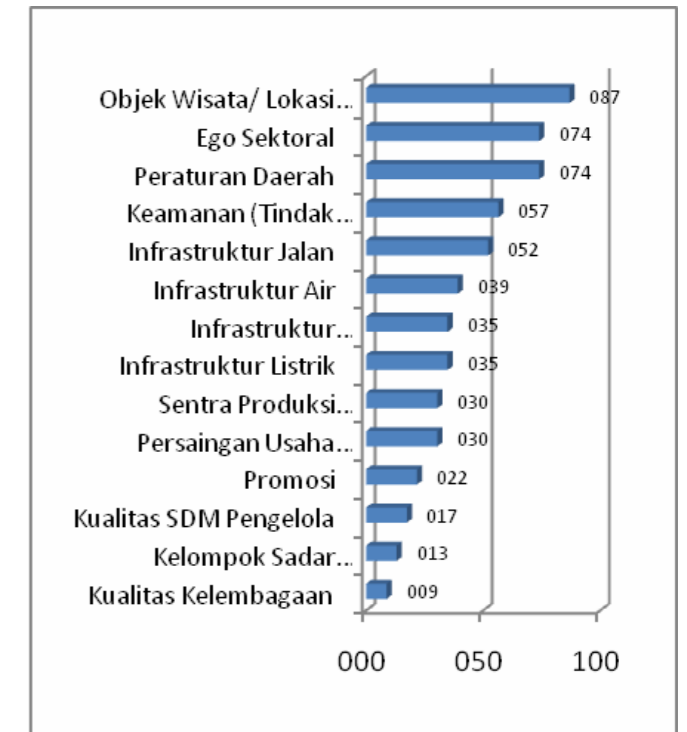
- (1) Objek Wisata/ Lokasi Wisata
- (2) Infrastruktur Listrik
- (3) Infrastruktur Air
- (4) Infrastruktur Komunikasi
- (5) Infrastruktur Jalan
- (6) Kualitas SDM Pengelola
- (7) Promosi
- (8) Kelompok Sadar Wisata

- (9) Kualitas Kelembagaan
- (10) Persaingan Usaha Wisata
- (11) Sentra Produksi (UMKM) Pendukung Pariwisata
- (12) Keamanan (Tindak Kriminal, Perampokan dan Pencurian)
- (13) Peraturan Daerah
- (14) Ego Sektoral, dan lain-lain

A.5. Aspek Permasalahan Pengembangan Pariwisata Jangka Pendek

Aspek permasalahan utama pengembangan pariwisata dalam jangka pendek di Kabupaten Muara Enim adalah pengembangan kawasan objek wisata/lokasi wisata, pengendalian ego sektoral, peraturan daerah, keamanan, dan peningkatan infrastruktur jalan. Meskipun demikian, yang juga perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam mendukung pengembangan pariwisata tersebut adalah persaingan usaha wisata, peningkatan promosi pariwisata, kualitas SDM pengelola, peningkatan sosialisasi dan membentuk kelompok sadar wisata, dan peningkatan kualitas kelembagaan, karena hal ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Muara Enim.

Menjadi sangat penting apabila pemerintah Kabupaten Muara Enim ingin melakukan rencana aksi pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan UMKM di Kabupaten Muara Enim, sehingga tujuan dan sasaran dalam mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan komoditas dan produk unggulan desa di sektor agribisnis, agroindustri dan agropolitan di Kabupaten Muara Enim.



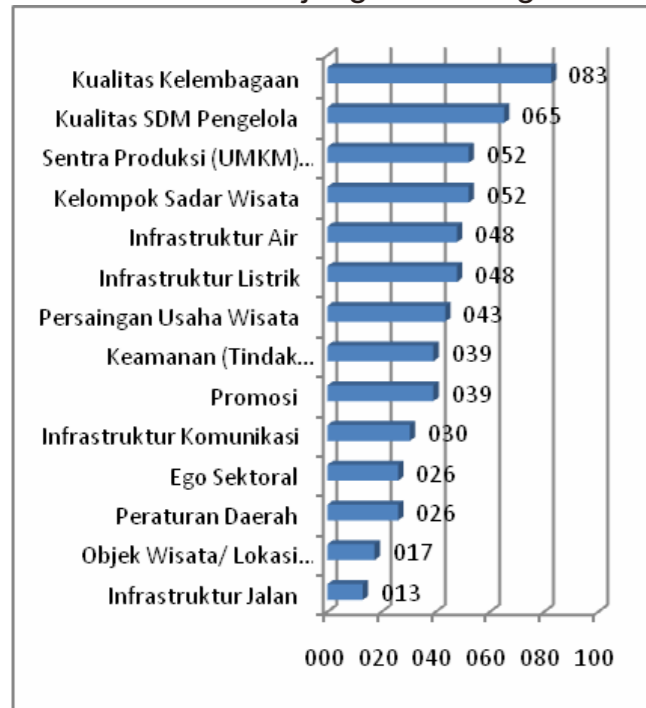
Gambar 4. Aspek Permasalahan Pengembangan Pariwisata dalam Jangka Pendek

Sumber : Data Lapangan, 2019

A.6. Aspek Permasalahan Pengembangan Pariwisata Jangka Menengah

Aspek permasalahan utama pengembangan pariwisata dalam jangka menengah di Kabupaten Muara Enim adalah Kualitas Kelembagaan, Kualitas SDM Pengelolaan, Sentra Produksi dan Kelompok Sadar Wisata. Meskipun demikian, yang juga perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam mendukung pengembangan pariwisata tersebut adalah Infrastruktur Komunikasi, Ego Sektoral, Peraturan Daerah, Objek Wisata/Lokasi Wisata, Infrastruktur Jalan, karena hal ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten

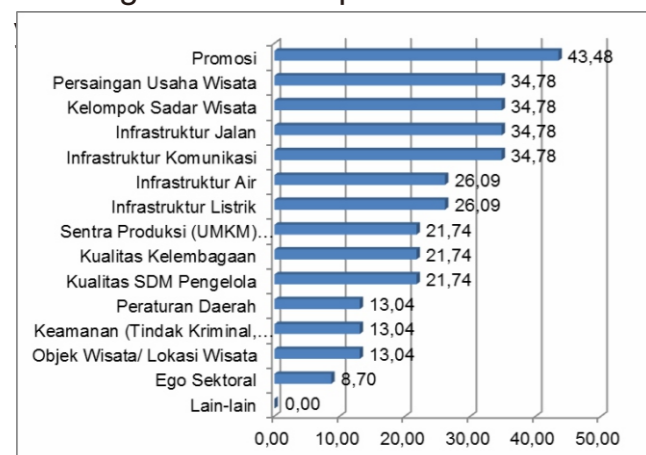
Muara Enim dalam jangka menengah



Gambar 5. Aspek Pengembangan Pariwisata dalam Jangka Menengah
Sumber : Data Lapangan, 2019

A.7. Aspek Permasalahan Pengembangan Pariwisata Jangka Panjang

Aspek permasalahan utama pengembangan pariwisata dalam jangka menengah di Kabupaten Muara Enim



Gambar 6. Aspek Pengembangan Pariwisata dalam Jangka Panjang
Sumber : Data Lapangan, 2019

Promosi, Pesaingan Usaha Wisata, Kelompok Sadar Wisata, Infrastruktur Jalan, dan Infrastruktur Komunikasi. Meskipun demikian, yang juga perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam mendukung pengembangan pariwisata tersebut adalah Kualitas SDM Pengelola, Peraturan Daerah, Keamanan dan Objek Wisata, karena hal ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten Muara Enim dalam jangka menengah

A.8. Upaya Pengembangan UMKM

Perkembangan UMKM di Kabupaten Muara Enim juga di dorong oleh program pemerintah pusat dan daerah antara lain (1) program pelatihan peningkatan kapasitas bagi SDM dalam UMKM berupapelatihan kewirausahaan, pelatihan perkoperasian, pelatihan *technopreneur*, pelatihan *vocational*, dan pelatihan berbasis kompetensi; (2) fasilitasi Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK); (3) fasilitasi promosi dan pameran bagi UMKM.

Adapun upaya percepatan untuk meningkatkan perkembangan UMKM di Kabupaten Muara Enim antara lain:

- (1) Melakukan penguatan pada program-program yang menjadi titik lemah di dalam capaian kinerja tersebut, seperti Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi,
- (2) Peningkatan Jaringan Kerjasama antar Lembaga Koperasi, Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,
- (3) Pengembangan jaringan infrastruktur UMKM, fasilitasi kemudahan formalisasi Badan UMKM, fasilitasi

- pengembangan sarana promosi hasil produksi,
- (4) Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM, memfasilitasi peningkatan kemitraan bagi UMKM, penyelenggaraan promosi produk UMKM, sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan,

- (5) Koordinasi penggunaan Dana pemerintah bagi umkm serta koordinasi pemanfaatan fasilitasi Pemerintah untuk UMKM.

Tabel 1. Analisis Matriks SWOT

Situasi Internal (IFAS)	STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan potensi ekonomi daerah yang dapat untuk industri dan perdagangan yaitu berupa Potensi Sumberdaya Alam sebagai bahan baku melimpah 2. Pertumbuhan Ekonomi yang relatif stabil 3. Keamaan yang kondusif 4. Sebaran dan Jumlah UMKMK yang merata 5. Mulai berkembangnya BUMDesa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya tingkat profesionalisme SDM aparatur maupun pelaku usaha 2. Produk belum dapat bersaing dipasaran baik kualitas maupun kuantitas 3. Minimnya pemanfaatan teknologi bagi pengembangan UMKM 4. Sentra-sentra produksi Industri UMKMK belum tertata dan belum terbentuk secara optimal dalam kelompok-kelompok usaha bersama 5. Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi 6. Terbatasnya akses permodalan bagi koperasi dan UMKM 7. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung koperasi dan UMKM
Situasi Eksternal (EFAS)		

Situasi Internal (IFAS)	STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan potensi ekonomi daerah yang dapat untuk industri dan perdagangan yaitu berupa Potensi Sumberdaya Alam sebagai bahan baku melimpah 2. Pertumbuhan Ekonomi yang relatif stabil 3. Keamanan yang kondusif 4. Sebaran dan Jumlah UMKMK yang merata 5. Mulai berkembangnya BUMDesa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya tingkat profesionalisme SDM aparatur maupun pelaku usaha 2. Produk belum dapat bersaing dipasaran baik kualitas maupun kuantitas 3. Minimnya pemanfaatan teknologi bagi pengembangan UMKMK 4. Sentra-sentra produksi Industri UMKMK belum tertata dan belum terbentuk secara optimal dalam kelompok-kelompok usaha bersama 5. Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi 6. Terbatasnya akses permodalan bagi koperasi dan UMKMK 7. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung koperasi dan UMKMK
Situasi Eksternal (EFAS)	STRATEGI (S-O)	STRATEGI (W-O)
<p>OPPORTUNITY (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbukanya peluang memasuki pasar bebas 2. Terbukanya pasar produk kerajinan, kesempatan promosi, dan pesatnya perkembangan teknologi informasi 3. Adanya bantuan modal usaha dari Pemerintah Daerah melalui GERBANG SERASAN, Perbankan dan Pihak Swasta 4. Jumlah usaha bidang perdagangan dan industri terus bertambah 5. Adanya dukungan pendanaan dari Dana Desa dan ADD 6. Kebijakan Pemerintah yang sangat mendukung perkembangan koperasi dan UMKMK 7. Animo masyarakat yang tinggi dalam membuka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penguatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan 2. Optimalisasi pengelolaan potensi unggulan desa dan pengembangan usaha Bumdes 3. Meningkatkan kemitraan dan jaringan dengan masyarakat serta dunia usaha 4. Mengupayakan pangaangran sarana prasarana di desa yang bersumber dari pendanaan lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerja sama dalam menyediakan kredit bagi pelaku UMKMK dengan bunga rendah. 2. Memperluas jaringan pemasaran. 3. Memperbaiki kualitas SDM. 4. Menerapkan teknologi yang tepat guna. 5. Menciptakan Iklim usaha yang kondusif. 6. Menyediakan sarana dan prasarana usaha yang memadai

Sumber : Tim Ahli

Tabel 2 Strategi Operasional Pengembangan Kepariwisataan

Lingkup Pengembangan Kepariwisataan	Strategi Operasional
Pembangunan Destinasi Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan daya tarik wisata utama di setiap kawasan pariwisata unggulan berstandar lokal, regional dan nasional 2. Pengembangan jalur wisata tematik dengan tema utama Kabupaten Muara Enim 3. Pembangunan fasilitas dan prasarana umum tematik di setiap jalur wisata (air bersih, jaringan komunikasi, listrik, rumah singah) 4. Pengembangan koordinasi lintas sektor dan kerja sama dengan dunia usaha dalam pengembangan aksesibilitas nasional. 5. Pengembangan investasi usaha pariwisata berbasis wisata alam, kuliner, ilmu pengetahuan, ekowisata, sert a penyelenggaraan pameran berstandar nasional.
Pembangunan Industri Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan usaha pariwisata tematik, berbasis masyarakat, berstandar nasional.
Pembangunan Pemasaran Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pemasaran pariwisata terpadu dan tematik Kabupaten Muara Enim 2. Pengembangan paket wisata tematik dan interpretatif.
Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan koordinasi berkesinambungan dalam pembangunan aksesibilitas yang menghubungkan pusat - pusat pariwisata dengan daya tarik wisata unggulan, di Kabupaten Muara Enim. 2. Pengembangan koordinasi tahunan dalam penyepakatan, penetapan, dan pelaksanaan program strategis bersama seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, media). 3. Pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

B. ANALISIS MATRIKS SWOT

Hasil identifikasi yang telah dilakukan melalui pendekatan analisis SWOT dengan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada kondisi UMKMK dan berikutnya adalah menganalisis faktor-faktor tersebut untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut mengenai kondisi UMKMK pada

masyarakat sehingga dapat ditentukan strategi dan langkah-langkah yang dapat diterapkan kedepannya.

Langkah awal tahap analisa terhadap faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pemberdayaan UMKMK adalah dengan melakukan analisa melalui matrik IFAS (*Internal Strategic Faktor Analisis Summary*) dan EFAS

(*Eksternal Strategic Faktor Analisis Summary*) Selanjutnya dari hasil analisa dengan menggunakan matrik IFAS dan EFAS akan dianalisis dengan menggunakan matriks analisis SWOT untuk mendapatkan gambaran akhir kedudukan UMKM di Kabupaten Muara Enim.

C. STRATEGI

C.1. Strategi S-O

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan matrik SWOT dari beberapa faktor internal, berupa kekuatan dan peluang, serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman untuk menentukan strategi kompetitif bagi UMKM adalah dengan melakukan strategi menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang (Strategi S-O):

1. Meningkatkan penguatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan
2. Optimalisasi pengelolaan potensi unggulan desa dan pengembangan usaha Bumdes
3. Meningkatkan kemitraan dan jaringan dengan masyarakat serta dunia usaha
4. Mengupayakan penganggaran sarana prasarana di desa yang bersumber dari pendanaan lainnya

C.2. Strategi W-O

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan matrik SWOT dari beberapa faktor internal, berupa kelemahan dan peluang, serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman untuk menentukan strategi kompetitif bagi UMKM adalah dengan melakukan strategi meminimalkan kelemahan dan

memanfaatkan peluang (Strategi W-O):

1. Kerjasama dalam menyediakan kredit bagi pelaku UMKM dengan bunga rendah.
2. Memperluas jaringan pemasaran.
3. Memperbaiki kualitas SDM.
4. Menerapkan teknologi yang tepat guna.
5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif.
6. Menyediakan sarana dan prasarana usaha yang memadai

C.3 Strategi S-T

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan matrik SWOT dari beberapa faktor internal, berupa kekuatan dan tantangan, serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman untuk menentukan strategi kompetitif bagi UMKM adalah dengan melakukan strategi menggunakan kekuatan untuk menghadapi tantangan (Strategi S-T):

1. Memberikan pelatihan-pelatihan pada UKM guna meningkatkan mutu produk;
2. Memfasilitasi UKM untuk aspek mesin/peralatan sarana dan prasarana penunjang lainnya;
3. Memfasilitasi UKM untuk aspek permodalan;
4. Meningkatkan penguatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan
5. Optimalisasi pengelolaan potensi unggulan desa dan pengembangan usaha Bumdesa
6. Meningkatkan kemitraan dan jaringan dengan masyarakat serta dunia usaha
7. Mengupayakan penganggaran sarana prasarana di desa yang bersumber dari pendanaan lainnya

C.4. Strategi W-T

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan matrik SWOT dari beberapa faktor internal, berupa kelemahan dan tantangan, serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman untuk menentukan strategi kompetitif bagi UMKM adalah dengan melakukan strategi meminimalkan kelemahan untuk menghadapi tantangan (Strategi W-T):

1. Penguatan regulasi, kelembagaan ekonomi dan pengembangan komoditas unggulan desa/kawasan perdesaan
2. Membuat regulasi dan pedoman penggunaan anggaran yang bersumber dari APBdes untuk mendukung

peningkatan sarpras di desa

3. Koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder yang terkait dalam kebijakan peningkatan sarana prasarana di desa
 4. Memfasilitasi pembiayaan, peningkatan daya saing, perluasan dan penguatan kelembagaan, serta peningkatan usaha koperasi
- Strategi operasional dalam rangka pengembangan kepariwisataan melalui UMKM mencakup: 1) strategi pembangunan destinasi pariwisata; 2) strategi pembangunan industri pariwisata; 3) strategi pembangunan pemasaran pariwisata; dan 4) strategi pembangunan kelembagaan pariwisata.

Tabel 2 Strategi Operasional Pengembangan Kepariwisata

Lingkup Pengembangan Kepariwisata	Strategi Operasional
Pembangunan Destinasi Pariwisata	(1) Pengembangan daya tarik wisata utama di setiap kawasan pariwisata unggulan berstandar lokal, regional dan nasional (1) Pengembangan jalur wisata tematik dengan tema utama Kabupaten Muara Enim (2) Pembangunan fasilitas dan prasarana umum tematik di setiap jalur wisata (air bersih, jaringan komunikasi, listrik, rumah singah) (3) Pengembangan koordinasi lintas sektor dan kerja sama dengan dunia usaha dalam pengembangan aksesibilitas nasional. (4) Pengembangan investasi usaha pariwisata berbasis wisata alam, kuliner, ilmu pengetahuan, ekowisata, serta penyelenggaraan pameran berstandar nasional.
Pembangunan Industri Pariwisata	a. Pengembangan usaha pariwisata tematik, berbasis masyarakat, berstandar nasional.
Pembangunan Pemasaran Pariwisata	1. Pengembangan pemasaran pariwisata terpadu dan tematik Kabupaten Muara Enim 2. Pengembangan paket wisata tematik dan interpretatif.
Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata	(1) Pengembangan koordinasi berkesinambungan dalam pembangunan aksesibilitas yang menghubungkan pusat-pusat pariwisata dengan daya tarik wisata unggulan, di Kabupaten Muara Enim. (2) Pengembangan koordinasi tahunan dalam penyepakatan, penetapan, dan pelaksanaan program strategis bersama seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, media). (3) Pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

D. KEBIJAKAN

Pemerintah daerah mempunyai peran yang cukup strategis melalui kebijakan-kebijakan lokal yang lebih terarah serta sesuai karakteristik daerahnya masing-masing. Namun pengembangan pariwisata di banyak daerah di Indonesia masih belum memperoleh prioritas utama. Situasi ini membuat pariwisata tidak menjadi sasaran kebijakan secara langsung, yang terjadi adalah pengembangan pariwisata seringkali berada pada lingkup kebijakan sektor lain. Terlihat dari kebijakan pemerintah daerah tentang pengembangan pariwisata lebih sering dikaitkan dengan kebijakan tentang investasi (akses terhadap sumber Dana). Secara lebih tegas, pariwisata diposisikan sebagai sumber pendapatan bagi daerah (PAD) meski bukan yang utama.

Pengalaman menunjukkan bahwa daerah kurang mampu menggarap potensi yang ada secara maksimal, yang lebih sering muncul adalah penggarapan potensi pariwisata dengan penekanan pada aspek ekonomi saja. Beberapa daerah bahkan menempatkan pengembangan pariwisata sebagai bagian dari fungsi Dinas Pendapatan. Asumsinya adalah bahwa peningkatan pendapatan dapat memberikan imbas kepada aspek-aspek lain termasuk aspek sosial budaya dan juga lingkungan. Otonomi daerah,

dilain sisi juga menjadi problematik, karena melemahkan peran pemerintah pusat di dalam membangun pariwisata di daerah. Hal ini mempunyai implikasi panjang yang sering menimbulkan berbagai dampak negatif.

Berbagai perkembangan dan peristiwa dewasa ini membawa pengaruh besar pada perkembangan kepariwisataan, khususnya kepariwisataan dalam lingkup Kabupaten Muara Enim. Banyak potensi dan sekaligus permasalahan serta isu baru yang muncul ke permukaan yang membutuhkan penanganan dengan pendekatan yang lebih spesifik. Dinamika tersebut perlu diakomodasi ke dalam produk-produk rencana yang ada di daerah, agar potensi dan permasalahan serta isu-isu baru yang muncul dapat ditampung dan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan serta program tindak. Oleh sebab itu, arah pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Muara Enim sebaiknya adalah pembangunan yang berkelanjutan dengan melibatkan setiap unsur dan sektor yang ada dalam tatanan daerah. Setiap unsur dan sektor bahu membahu secara sinergis untuk dapat mengupayakan model pembangunan kepariwisataan yang terpadu dan sesuai dengan kultur dan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Muara Enim.

Tabel 3. Kebijakan Pembangunan Kawasan terkait Pariwisata

Pengembangan	Kriteria	Arahan Pengembangan
Kawasan Koridor Lahat-Muara Enim	Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dalam aspek : 1. Potensi ekonomi cepat tumbuh; 2. Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.	1. Berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional 2. Perlu sinergitas infrastruktur 3. Perlu sinergitas pembangunan antar daerah 4. Perlu dikendalikan agar tidak merambah kawasan pertanian/hutan 5. Perlu pelestarian cagar budaya yang berpotensi menjadi daya tarik wisata

Sumber: RIPPAR Provinsi Sumatera Selatan

D.1. Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Muara Enim

- Membuat dan mengembangkan program *calendar of event* dengan inovatif dan alternatif berkonsep kuat dan berkelanjutan.
- Membangun fasilitas untuk mendukung wisata berbasis Pariwisata Budaya dan Pariwisata Konvensi (MICE) seperti penyediaan gedung pertemuan/ konvensi, gedung pameran, dan fasilitas lainnya terutama di Kota Muara Enim dan Tanjung Enim.
- Pelatihan *capacity building* bagi SDM bidang pariwisata terutama pendukung kegiatan berbasis MICE.
- Meningkatkan Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) untuk menjadi unggulan bagi Kepariwisata Sumatera Selatan seperti: Air Terjun

Bedegung dan Tenang.

- Perencanaan Kawasan Wisata/Resort terutama kawasan terintegrasi untuk pelatihan/outbond untuk mendukung MICE terutama di Kota Muara Enim dan Tanjung Enim.
- Perencanaan dan pembangunan wisata buatan untuk mendukung MICE.
- Menyiapkan sebagian ODTW menjadi bagian Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP).
- Memperbaiki dan memelihara infrastruktur aksesibilitas yang ada dan pemberian tanda petunjuk lokasi ODTW.
- Memberdayakan masyarakat terutama dalam meningkatkan produk industri rumah tangga pendukung oleh-oleh.

Tabel 4. Objek dan Daya Tarik Wisata pada Kawasan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Muara Enim

Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah Muara Enim	Daya Tarik Wisata Alam		
	Berbasis Alam	Berbasis Budaya	Berbasis Minat Khusus
	1. Air Terjun Curup Tenang Bedegung 2. Air Terjun Dayang Rindu 3. Air Panas Gemuhak 4. Air Terjun Lemutu 5. Air Terjun Napal Carik 6. Danau Deduhok 7. Danau Segayam 8. Danau Lematang Putus	1. Bukit Semendo 2. Rumah Adat	1. Tambang Batubata PTBA 2. Kebun Binatang Sriwijaya 3. Kebun Kopi 4. Kebun Strawberry 5. Arung Jeram

Sumber: RIPPAR Provinsi Sumatera Selatan

POTENSI UNGGULAN DAN RENCANA AKSI PENGEMBANGAN PARIWISATA

A. Unggulan Wisata dan Komitmen Pihak Ketiga

Kabupaten Muara Enim juga telah merancang desa wisata yang tersebar di 7 kecamatan dan 15 desa. Potensi wisata desa tersebut memiliki potensi unggulan desa yang terdiri dari buah-buahan (produk lokal selai, dodol, wajik dan lain-lain), wisata alam (air terjun), budaya lokal, agrowisata (Tabel 5.1). Produk-produk yang akan dikembangkan tidak lepas dari aspek keberlanjutan.

Objek wisata tersebut telah memenuhi unsur pembangunan pariwisata yang berkelanjutan antara lain:

- 1) Melibatkan partisipasi masyarakat: masyarakat harus mampu mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dikembangkan dan berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi-strategi yang ada.
- 2) Keikutsertaan para *stakeholder* involment: Para pelaku yang ikut serta dalam pembangunan pariwisata meliputi kelompok dan institusi, pemerintah daerah, asosiasi bisnis, perusahaan dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan (*stakeholder*).
- 3) Kepemilikan lokal; pembangunan

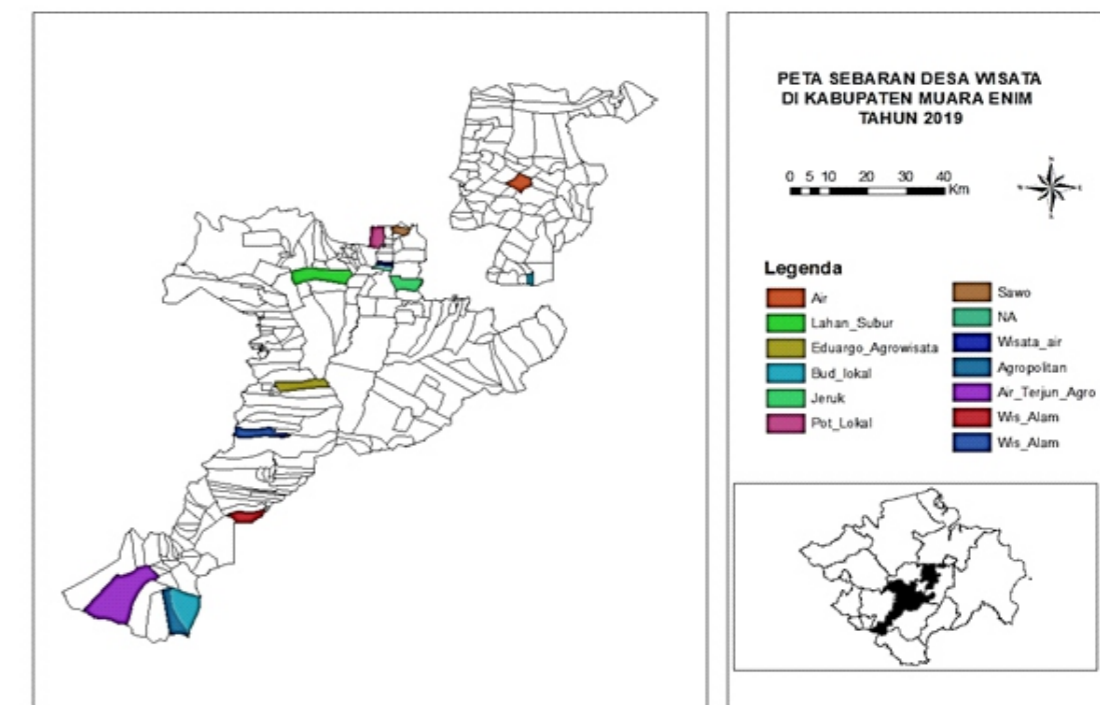
pariwisata harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Fasilitas penunjang kepariwisataan seperti hotel, restoran, *homestay* seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat setempat.

- 4) Penggunaan sumber daya yang berkelanjutan; pembangunan pariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (irreversible) secara berlebihan.
- 5) Mewadahi tujuan-tujuan masyarakat: Tujuan-tujuan masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara pengunjung/wisatawan, tempat dan masyarakat setempat dapat terwujud. Misalnya adanya kerjasama dalam wisata mulai dari tahap perencanaan, manajemen, sampai pemasaran;
- 6) Promosi
Promosi merupakan media yang dapat digunakan dalam penyebaran informasi mengenai pariwisata. Secara spasial sebaran potensi pariwisata unggulan di Kabupaten Muara Enim terlihat pada Gambar 7.

Tabel 5. Potensi Unggulan Destinasi Wisata dan Dukungan Pihak Ketiga

No	Kecamatan	Desa	Potensi	Pihak Ketiga
1	Rambang Niru	1. Air Talas 2. Tebat Agung 3. Kasih Dewa	Jeruk (selai, sirup, pie) Wisata air (spot swafoto, wisata air, pemancingan)	PT. Pertamina Persero PT. TEL PT. TEL
2	Gunung Megang	1. Sidomulyo 2. Sumaja Makmur	Madu	PT. Pertamina Persero PT Medco
3	Empat Petulai Dangku	1. Dangku 2. Banuayu	Sawo (bahan olahan dodol, permen, wajik, sirup dan selai) Olahan ikan patin	PT. TEL PT TEL
4	Semende Darat Ulu	1. Segamit 2. Pelakat 3. Tanjung Tiga	Daerah Hamparan utk spot wisata air terjun, agropolitan, budaya lokal	Supreme
5	Lawang Kidul	1. Tegal Rego	Potensi Eduargo, agrowisata	PT. Bukit Asam Persero
6	Tanjung Agung	1. Tanjung Karang 2. Sleman 3. Bedegung	Wisata Alam (air terjun)	PT. Bukit Asam Persero PT. Bukit Asam Persero PT. Bukit Asam Persero
7	Gelumbang	1. Midar	Lemon	Pertamigas

Sumber: Rumah UMKMK Gerbang Serasan, 2019

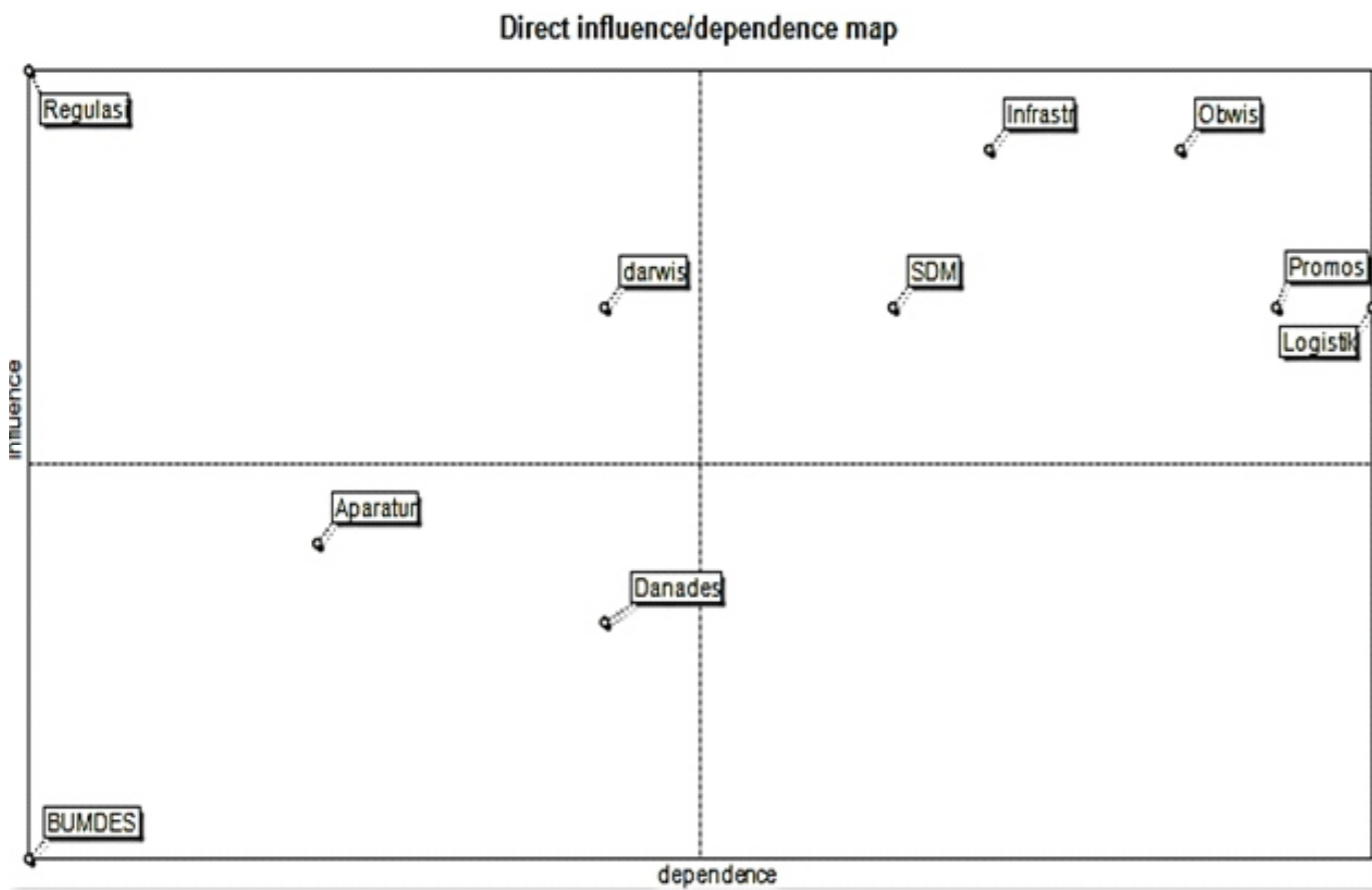


Gambar 7. Sebaran Potensi Unggulan Pariwisata Kabupaten Muara Enim
Sumber: UPPM FE Unsri, 2019

Produk unggulan berlokasi di 15 desa sehingga menjadi objek wisata desa. Keberlangsungan wisata desa akan sangat tergantung dari faktor-faktor yang terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa Regulasi (peraturan pemerintah daerah) dan Kelompok Sadar Wisata berpengaruh besar terhadap keberadaan desa wisata namun berdampak kecil. Oleh karena itu, diperlukan aspek kelembagaan (peraturan daerah) yang menguatkan keberadaan kelompok sadar wisata. Hal

ini penting karena kelompok sadar wisata merupakan ujung tombak keberhasilan desa wisata di Kabupaten Muara Enim.

Sementara itu, infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, keberadaan objek wisata dan promosi, logistik (travel agen, homestay, tiket) memiliki pengaruh dan dampak besar terhadap perkembangan desa wisata. Namun, BUMDes, Aparatur Desa dan Dana Desa memiliki pengaruh yang kecil dan dampak yang kecil terhadap keberadaan desa wisata (Gambar 8)



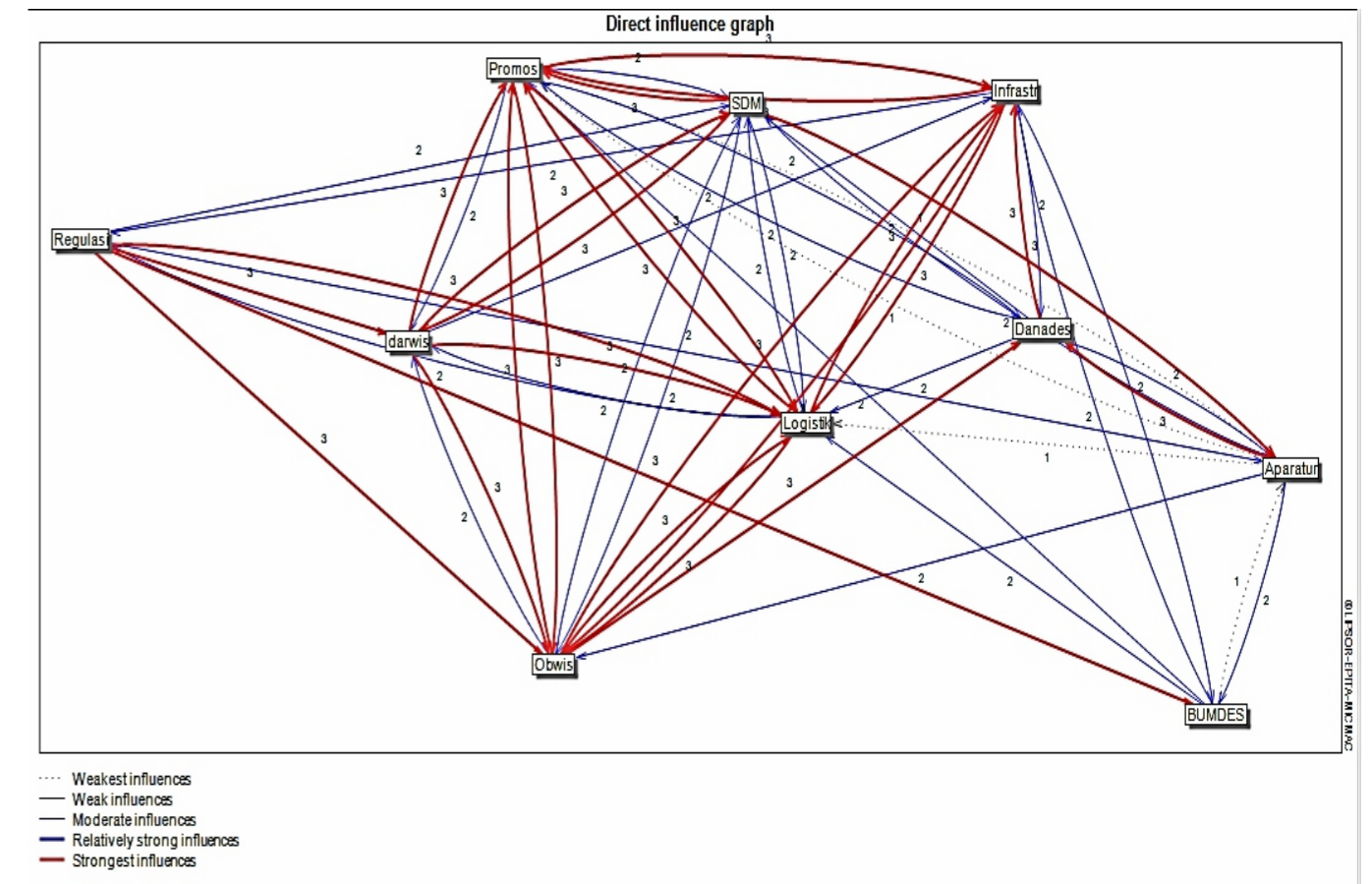
Gambar 8. Pengaruh Langsung Variabel terhadap Keberadaan Desa Wisata
Sumber: Data Lapang (diolah), 2019

Secara grafik terlihat sumber daya manusia, infrastruktur, logistik dan promosi merupakan variabel yang memiliki keterkaitan yang besar. Implikasinya pemerintah daerah harus mempertimbangkan variabel-variabel tersebut ketika mengembangkan desa wisata (Gambar 9).

Hasil olahan data pada Gambar 8 dan 9 sejalan dengan optimalisasi pengembangan pariwisata menurut Pendit

(2003), pengembangan pariwisata tidak akan berjalan baik apabila tidak memiliki unsur-unsur berikut:

1. Politik dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah;
2. Perasaan ingin tahu;
3. Sifat ramah tamah dan budaya masyarakat;
4. Jarak dan waktu (aksesibilitas);
5. Atraksi;
6. Akomodasi;
7. Pengangkutan (*courier*);
8. Harga-harga;
9. Publisitas dan promosi;
10. Kesempatan berbelanja.



Gambar 9. Pengaruh Faktor dalam Pengembangan Desa Wisata
Sumber: Data Lapang (diolah), 2019

Kesepuluh poin tersebut menjadi syarat dalam pengembangan pariwisata, pemerintah Kabupaten Muara Enim perlu melakukan penguatan pada beberapa poin yaitu akestabilitas ke tempat wisata, akomodasi dan pengangkutan publisitas dan belanja. Beberapa tempat wisata yang ada belum terintegrasi dengan baik sehingga diperlukan *road map*/rencana aksi daerah dalam mendorong pengembangan pariwisata di Kabupaten Muara Enim

Keberadaan infrastruktur, logistik, objek wisata, promosi menjadi faktor dominan dalam pengembangan desa wisata. Oleh karena itu diperlukan sinkronisasi program antar OPD.

B. Prinsip Aspek Pembangunan Kepariwisataan

Pengembangan kepariwisataan baik pusat dan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang kepariwisataan, dijelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan untuk mendoraong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional maupun global.

Pasal 33 dalam undang-undang tersebut pada konteks pemerintah daerah dapat diterjemahkan bahwa dalam rangka

meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan, yang meliputi bidang (1) pelayanan kepabebean, keimigrasian, dan karantina, (2) keamanan dan ketertiban, (3) prasarana umum berupa jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan, (4) transportasi darat, laut, dan udara, serta (5) promosi pariwisata dan kerja sama luar negeri.

Rencana aksi pengembangan pariwisata di Kabupaten Muara Enim berpedoman pada prinsip dan aspek pembangunan kepariwisataan. Beberapa poin yang menjadi penenakan dalam kajian ini adalah koordinasi lintas sektor yang harus dilakukan oleh organisasi perangkat daerah.

C. Rencana Aksi Pengembangan Pariwisata

Rencana Aksi pengembangan Pariwisata melalui pemberdayaan UMKM di Kabupaten Muara Enim akan mulai dilaksanakan pada tahun 2020. Strategi ini mendukung tindakan kolaboratif antara para pemangku kepentingan dalam perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan objek wisata alam di Kabupaten Muara Enim sebagai sebuah tujuan tunggal. Strategi ini menetapkan

program yang rinci, anggaran dan realisasi pada pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui pemberdayaan UMKM di Kabupaten Muara Enim berdasarkan pemanfaatan objek wisata di Kabupaten Muara Enim. Program untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi/program pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan UMKM mencakup:

- a. Pembangunan Destinasi Pariwisata
 1. Pengembangan daya tarik wisata utama di setiap kawasan pariwisata unggulan berstandar lokal, regional dan nasional.
 2. Pengembangan jalur wisata tematik dengan tema utama Kabupaten Muara Enim
 3. Pembangunan fasilitas dan prasarana umum tematik di setiap jalur wisata (air bersih, jaringan komunikasi, listrik, rumah singah)
 4. Pengembangan koordinasi lintas sektor dan kerja sama dengan dunia usaha dalam pengembangan aksesibilitas nasional.
 5. Pengembangan investasi usaha pariwisata berbasis wisata alam, kuliner, ilmu pengetahuan, ekowisata, serta penyelenggaraan pameran berstandar nasional.
- b. Pembangunan Industri Pariwisata
 1. Pengembangan usaha pariwisata tematik, berbasis masyarakat,

- berstandar nasional
2. Memperkuat posisi UMKM dalam menunjang pasar pariwisata
3. Peningkatan keragaman dan kualitas produk UMKM

c. Pembangunan Pemasaran Pariwisata/Promosi

1. Pengembangan pemasaran pariwisata terpadu dan tematik Kabupaten Muara Enim
2. Pengembangan paket wisata tematik dan interpretatif.

d. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan

1. Pengembangan koordinasi berkesinambungan dalam pembangunan aksesibilitas yang menghubungkan pusat-pusat pariwisata dengan daya tarik wisata unggulan, di Kabupaten Muara Enim.
2. Pengembangan koordinasi tahunan dalam penyepakatan, penetapan, dan pelaksanaan program strategis bersama seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, media).

Pengembangan sebuah sistem pemantauan dan evaluasi yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

Tabel 6. Prinsip dan Aspek Pembangunan Kepariwisataaan

Muatan	Uraian	
Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataaan	(1) Menjunjung tinggi norma agama dan budaya (2) Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman, budaya dan kearifan lokal (3) Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas (4) Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup (5) Memberdayakan masyarakat setempat (6) Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antar pusat dan daerah serta keterpaduan antarpemangku kepentingan (7) Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang kepariwisataan (8) Memperkukuh keutuhan NKRI	
Aspek yang Diatur dalam Pembangunan Kepariwisataaan	Pembangunan Industri Pariwisata	(1) Struktur pariwisata (2) Daya saing produk wisata (3) Kemitraan usaha pariwisata (4) Promosi pariwisata (5) Kredibilitas bisnis (6) Tanggungjawab terhadap lingkungan
	Pembangunan Destinasi Pariwisata	(1) Perwilayahan pariwisata (2) Daya tarik wisata (3) Aksestabilitas pariwisata (4) Prasana umum, fasilitas umum, fasilitas pariwisata (5) Pemberdayaan masyarakat (6) Investasi pariwisata
	Pembangunan Pemasaran Pariwisata	(1) Pasar wisatawan (2) Citra pariwisata (3) Kemitraan pemasaran pariwisata (4) Promosi pariwisata
	Pembangunan Kelembagaan Pariwisata	1. Organisasi kepariwisataan 2. Sumber daya pariwisata 3. Regulasi dan mekanisme operasional bidang kepariwisataan
Koordinasi	Koordinasi Lintas Sektor	1. Koordinasi strategis lintas sektor dilakukan pemerintah daerah pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan 2. Koordinasi strategis lintas sektor pada bidang <ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan ketertiban 2. Prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan kesehatan lingkungan 3. Transportasi darat 4. Promosi dan kerjasama lokal, nasional dan luar negeri

Sumber: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

1. KESIMPULAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Muara Enim mengalami pertumbuhan setiap tahunnya dan diharapkan mampu mendorong percepatan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sektor jasa, industri pariwisata diyakini akan menciptakan *income multiplication* yang besar bagi pemerintah Kabupaten Muara Enim. Jumlah UMKM pada tahun 2018 sebanyak 5.336 UMKM baik mikro, kecil ataupun menengah dan meningkat sebanyak 115 unit bila dibandingkan tahun 2017.

Jumlah wisatawan domestik juga mengalami peningkatan yang sangat tajam, data tahun 2016 menunjukkan jumlah wisatawan domestik sebanyak 36.783 orang dan meningkat sebesar 31,75% pada tahun 2017. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat dan potensi wisata di kabupaten Muara Enim serta adanya pergeseran prioritas penggunaan dana desa. Namun, disisi lain jumlah wisatawan mancanegara menurun sangat tajam, tahun 2016 sebanyak 45 orang dan pada tahun 2017 hanya sebanyak 5 orang.

Peningkatan kinerja industri pariwisata erat kaitannya dengan aktivitas industri UMKM. Destiniasi wisata yang dibaur dengan potensi desa tentunya telah

menjadi tren di beberapa wilayah. Sejauh ini pemerintah Kabupaten Muara Enim sudah memiliki 15 desa wisata yang tersebar di 7 kecamatan. UMKM yang ada telah didampingi pihak ketiga (perusahaan BUMN maupun BUMS) sehingga kesulitan mendasar yang dihadapi oleh UMKM seperti kurangnya permodalan, terbatas akses pemasaran, kelembagaan yang belum optimal, kualitas produk yang memenuhi standar, pengurusan Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan kurang profesional dalam mengelola usaha dapat diatasi.

Beberapa program telah dilakukan oleh beberapa dinas terkait guna memicu peningkatan UMKM seperti program pengembangan industri kecil dan menengah, pengembangan sentra-sentra industri, peningkatan kelembagaan U M K M , dan pengembangan kewirausahaan. Hasil kajian menunjukkan prioitas produk UKM yang mendorong pengembangan pariwisata adalah industri kreatif kuliner dan kerajinan tangan. Kedua jenis produk ini melibatkan parsitipasi masyarakat sehingga keberlangsungannya dapat terjamin. Selain itu, Kabupaten Muara Enim memiliki potensi desa wisata yang telah mendapat pendampingan pihak ketiga sehingga implementasi pembangunan pariwisata berkelanjutan

dapat terwujud.

Permasalahan terbesar dalam pengembangan pariwisata adalah objek wisata yang belum dikelola secara optimal, ego sektoral, peraturan daerah yang belum berjalan dengan baik, kondusifitas keamanan, infrastruktur (jalan, air, komunikasi, listrik).

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa Regulasi (peraturan pemerintah daerah) dan Kelompok Sadar Wisata berpengaruh besar terhadap keberadaan desa wisata namun berdampak kecil. Sementara itu, infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, keberadaan objek wisata dan promosi, logistik (*travel agen, homestay, tiket*) memiliki pengaruh dan dampak besar terhadap perkembangan desa wisata. Namun, BUMDesa, Aparatur Desa dan Dana Desa memiliki pengaruh yang kecil dan dampak yang kecil terhadap keberadaan desa wisata.

Secara umum, rencana aksi daerah untuk pengembangan pariwisata mencakup: 1) pembangunan destinasi pariwisata, 2) pembangunan industri pariwisata, 3) pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan

kelembagaan kepariwisataan.

REKOMENDASI

1. Pemerintah daerah sebaiknya menetapkan regulasi tentang 15 desa wisata di Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah daerah sebaiknya menetapkan regulasi tentang kelompok sadar wisata Kabupaten Muara Enim.
3. Pemerintah daerah sebaiknya memfokuskan pengembangan kepariwisataan pada 15 desa yang telah ada/memperoleh pendampingan daerah pihak ketiga.
4. Pemerintah sebaiknya memperhatikan faktor-faktor (infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, keberadaan objek wisata dan promosi, logistik (*travel agen, homestay, tiket*) yang memiliki pengaruh besar dan berdampak besar terhadap keberadaan desa wisata.
5. Pemerintah daerah sebaiknya mengembangkan jalur wisata tematik berbasis masyarakat dalam bentuk paket wisata.
6. Pemerintah daerah mengoptimalkan koordinasi antar OPD terkait guna mengurangi ego sektoral.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2018. Muara Enim Dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kab. Muara Enim*. Muara Enim: BPS
- Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Muara Enim. 2018
- Dinas Pariwisata Kabupaten Muara Enim. 2018 Rencana Strategi Dinas Perdagangan Kab. Muara Enim
- Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Muara Enim, 2018-2023
- Rencana Strategi Dinas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kab. Muara Enim, 2018-2023
- Rencana Strategi Dinas Bappeda Kab. Muara Enim, 2018-2023
- RPJMD 2018-2023 Kabupaten Muara Enim
- Rumah UMKMK Gerbang Serasan. 2019.

JURNAL INTEGRITAS SERASAN SEKUNDANG (JOURNAL INTEGRITATION SERASAN SEKUNDANG)	
p-ISSN e-ISSN	Vol, 03, No. 01, 2021
ABSTRAK	
PERANAN KOMITE DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA SMPN 1 BANYUASIN 2 KABUPATEN BANYUASIN	
Jamaluddin, Maulana*, Universitas Tamansiswa Palembang *email: maulana_57@ymail.com	
ABSTRAK	
<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran komite dalam pembangunan sarana prasarana SMPN 1 Banyuasin 2 Kabupaten Banyuasin serta menganalisis Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Komite Dalam Pembangunan Sarana Prasarana SMPN 1 Banyuasin 2 Kabupaten Banyuasin.</p> <p>Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis data model Miles dan Huberman mencakup tiga kegiatan yang bersamaan: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.</p> <p>Hasil penelitian menjelaskan bahwa: Peran Komite Sekolah dalam pembangunan prasarana pendidikan di SMPN 1 Banyuasin 2 Kabupaten Banyuasin antara lain: sebagai pendukung pembangunan prasarana Di SMPN 1 Banyuasin 2 Kabupaten Banyuasin dalam bentuk Dana, pikiran, dan pengelolaan sarana prasarana, sebagai pengontrol, dalam pengawasan pembangunan gedung, memeriksa pengelolaan keuangan perlu dioptimalkan terutama dalam pengadaan sarana dan prasarana dan dana. peran sebagai penghubung antara sekolah dengan masyarakat dalam pengadaan sarana prasarana sekolah dan dana juga masih harus dioptimalkan. Faktor pendukung peran komite sekolah dalam pembangunan prasarana pendidikan di SMPN 1 Banyuasin 2 Kabupaten Banyuasin adalah tingginya partisipasi dari wali murid terhadap pembangunan prasarana SMPN 1 Banyuasin 2 Kabupaten Banyuasin. Faktor Penghambat Peran Komite Sekolah dalam pembangunan prasarana pendidikan di SMPN 1 Banyuasin 2 Kabupaten Banyuasin antara lain belum maksimalnya partisipasi masyarakat Sungsang IV, Kec. Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin dalam membangun prasarana di SMPN 1 Banyuasin 2 Kabupaten Banyuasin.</p>	
Kata Kunci: Peran, Komite Sekolah, Sarana Prasarana.	
ABSTRACT	
<p>This study aims to analyze the role of the committee in the construction of infrastructure at SMPN 1 Banyuasin 2, Banyuasin Regency and to analyze the Supporting and Inhibiting Factors of the Committee's Role in the Development of Infrastructure for SMPN 1 Banyuasin 2, Banyuasin Regency.</p> <p>This research is included in the type of qualitative research. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, and documentation studies. The data analysis technique was carried out using the Miles and Huberman model data analysis which included three simultaneous activities: data reduction, data presentation and conclusion drawing.</p> <p>The results of the study explain that: The role of the School Committee in the development of educational infrastructure at SMPN 1 Banyuasin 2, Banyuasin Regency, among others: as a supporter of infrastructure development at SMPN 1 Banyuasin 2 Banyuasin Regency in the form of funds, thoughts, and management of infrastructure facilities, as a controller, in supervising development building, checking financial management needs to be optimized, especially in the procurement of facilities and infrastructure and funds. the role as a liaison between schools and the community in the procurement of school infrastructure and funds also still has to be optimized. The supporting factor for the role of the school committee in the development of educational infrastructure at SMPN 1 Banyuasin 2, Banyuasin Regency is the high participation of students' parents in the infrastructure development of SMPN 1 Banyuasin 2, Banyuasin Regency. Factors Inhibiting the Role of School Committees in the development of educational infrastructure at SMPN 1 Banyuasin 2 Banyuasin Regency, among others, have not yet maximized community participation in Sungsang IV, Kec. Banyuasin II, Banyuasin Regency in building infrastructure at SMPN 1 Banyuasin 2, Banyuasin Regency.</p>	
Keywords: Role, School Committee, Infrastructure.	

PENDAHULUAN

Keberadaan dan peran komite sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan sekolah di berbagai daerah sangat bervariasi, baik dari segi status, kinerja, peran, kualitas sekolah, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh komite sekolah. Berkaitan dengan kelembagaan tersebut perlu adanya dukungan pemerintah terhadap keberadaan komite sekolah. Oleh karena itu, perlu adanya suatu penelitian yang berkaitan dengan komite sekolah untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang peran komite sekolah yang telah terjadi selama ini. Komite Sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan Sekolah, maupun jalur pendidikan luar Sekolah. Untuk penamaan badan di sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan, seperti komite Sekolah, majelis madrasah, komite TK, atau nama-nama lain yang di sepakati bersama.

Terkait dengan peran masyarakat di dalam pelaksanaan pendidikan di dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992

BAB III pasal 4 partisipasi masyarakat dapat berbentuk:

- a) Pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah, pada semua jenis pendidikan kecuali pendidikan kedinasan, dan pada semua jenjang pendidikan di jalur pendidikan sekolah;
- b) Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan pengajaran, pembimbingan dan/atau pelatihan peserta didik;
- c) Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar dan/atau penelitian dan pengembangan;
- d) Pengadaan dan/atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah untuk menunjang pendidikan nasional;
- e) Pengadaan dana dan pemberian bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa, dan bentuk lain yang sejenis;
- f) Pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung, dan tanah untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar;

- g) Pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar;
- h) Pemberian kesempatan untuk magang dan/atau latihan kerja;
- i) Pemberian bantuan manajemen bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dan pengembangan pendidikan nasional;
- j) Pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan/atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan;
- k) Pemberian bantuan dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
- l) Keikutsertaan dalam program pendidikan dan/atau penelitian yang diselenggarakan oleh Pemerintah di dalam dan/atau di luar negeri (Imron, 2002).

Peningkatan mutu pendidikan, tidak dapat terlaksana tanpa pemberian kesempatan sebesar-besarnya pada sekolah yang merupakan ujung tombak terdepan untuk terlibat aktif secara mandiri mengambil keputusan tentang pendidikan. Sekolah harus menjadi bagian utama sedangkan masyarakat dituntut partisipasinya dalam peningkatan mutu yang telah menjadi komitmen sekolah demi

kemajuan masyarakat. Peningkatan mutu hanya akan berhasil jikalau ditekankan adanya kemandirian dan kreativitas sekolah. Salah satu tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam meningkatkan mutu pendidikan, bukan hanya sekedar memberikan bantuan berwujud material saja.

Salah satu peranan Komite Sekolah terhadap penyelenggaraan sekolah, yakni membantu meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di sekolah baik sarana, prasarana maupun teknis pendidikan. Memang diketahui bahwa pemenuhan sarana dan prasarana sekolah merupakan tugas dari pemerintah. Namun demikian bukan berarti bahwa masyarakat tidak dapat berpartisipasi dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat melalui Komite Sekolah dalam hal membantu pemerintah memenuhi sarana dan prasarana di sekolah. Kepedulian masyarakat sangat membantu percepatan terwujudnya sarana dan prasarana sekolah yang lengkap dan memadai dalam

mendukung kemajuan pendidikan siswa.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, ada beberapa permasalahan yang terjadi terkait dengan peran komite di SMPN 1 Banyuasin 2, yaitu belum terpenuhinya semua sarana dan prasarana di SMPN 1 Banyuasin 2 Kabupaten Banyuasin, kemudian belum terdata secara jelas sejauh mana peranan masyarakat Sungsang IV, Kec. Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin dalam membangun prasarana di SMPN 1 Banyuasin 2 Kabupaten Banyuasin, dan belum maksimalnya partisipasi masyarakat Sungsang IV, Kec. Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin dalam membangun prasarana di SMPN 1 Banyuasin 2 Kabupaten Banyuasin.

RUMUSAN MASALAH

Ada 3 persoalan utama dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis peranan komite dalam Pembangunan Prasarana SMPN 1 Banyuasin 2 Kabupaten Banyuasin serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat peranan komite dalam Pembangunan Prasarana SMPN 1 Banyuasin 2 Kabupaten Banyuasin?

TINJAUAN PUSTAKA

Peran

Peran berasal dari kata peran, berarti sesuatu yang menjadi bagian atau

memegang pimpinan yang terutama . Pengertian Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain. (W.J.S. Poerwadarminta : 1985:78).

Menurut Linton (1936:42), teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Mengapa seseorang mengobati orang lain, karena dia adalah seorang dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka dia harus mengobati pasien yang datang kepadanya Perilaku

ditentukan oleh peran sosial.

Jadi peranan dapat dikatakan sebagai pelaksanaan dari fungsi-fungsi oleh struktur-struktur tertentu. Peranan ini tergantung juga pada posisi atau kedudukan struktur itu dan harapan lingkungan sekitar terhadap struktur tadi. Peranan juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi serta kemampuan dari aktor tersebut” (Banyu dan Yani, 2005: 31).

Komite Sekolah/Madrasah

Komite Sekolah merupakan suatu badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya.

Komite Sekolah merupakan penyempurnaan dan perluasan badan kemitraan dan komunikasi antara sekolah dengan masyarakat. Sampai tahun 1994 mitra sekolah hanya terbatas dengan orang tua peserta didik dalam wadah yang disebut dengan POMG (Persatuan Orang Tua dan Guru), tahun 1994 sampai pertengahan 2002 dengan perluasan peran menjadi BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan) yang personilnya terdiri atas orang tua dan

masyarakat di sekitar sekolah. Sejak pertengahan tahun 2002 wadah tersebut bertambah peran dan fungsinya sekaligus perluasan personilnya yang terdiri atas orang tua dan masyarakat luas yang peduli terhadap pendidikan yang tidak hanya di sekitar sekolah. Perbedaan yang prinsip antara BP3 dengan komite sekolah adalah dalam peran dan fungsi, keanggotaan serta dalam pemilihan dan pembentukan kepengurusan.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor 044/U/2002 komite sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. diakses dari internet tanggal 3 Oktober 2016.

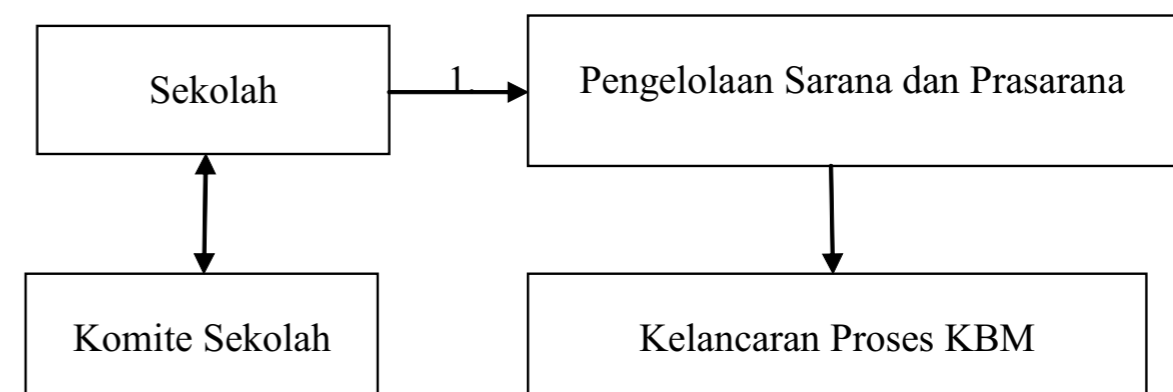
Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan; alat; media. Menurut E. Mulyasa (2004), Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses

pendidikan, khususnya proses belajar, mengajar, seperti bangunan, ruang kelas, kursi meja, serta alat-alat dan media pengajaran.

Sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajar mengajar. Menurut penyusun Pedoman Pembakuan Media Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1999), yang dimaksud dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Abdul Basith dan Indriana Rahmawati (2020) menyatakan Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi kinerja komite sekolah sangat penting dalam meningkatkan mutu sarana prasarana pendidikan. Senada dengan penelitian yang dilakukan Lina Haryati, Mardawani, & Agusta Kurniati, (2017)

KERANGKA BERFIKIR



METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian, secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan dengan menguji hipotesis.

Menurut Nawawi (2003: 63) penelitian deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. Adapun alasan peneliti menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini

menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan yang terjadi di lapangan dan melakukan analisis data untuk memberikan kebenaran dan kejadian-kejadian, fakta-fakta dari data yang diperoleh sehingga peneliti dapat memberikan gambaran dengan jelas.

TEKNIK ANALISA DATA

Menurut Miles dan Huberman (Emzir, 2010) menyatakan bahwa terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu:

1. **Condensation**

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti: merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

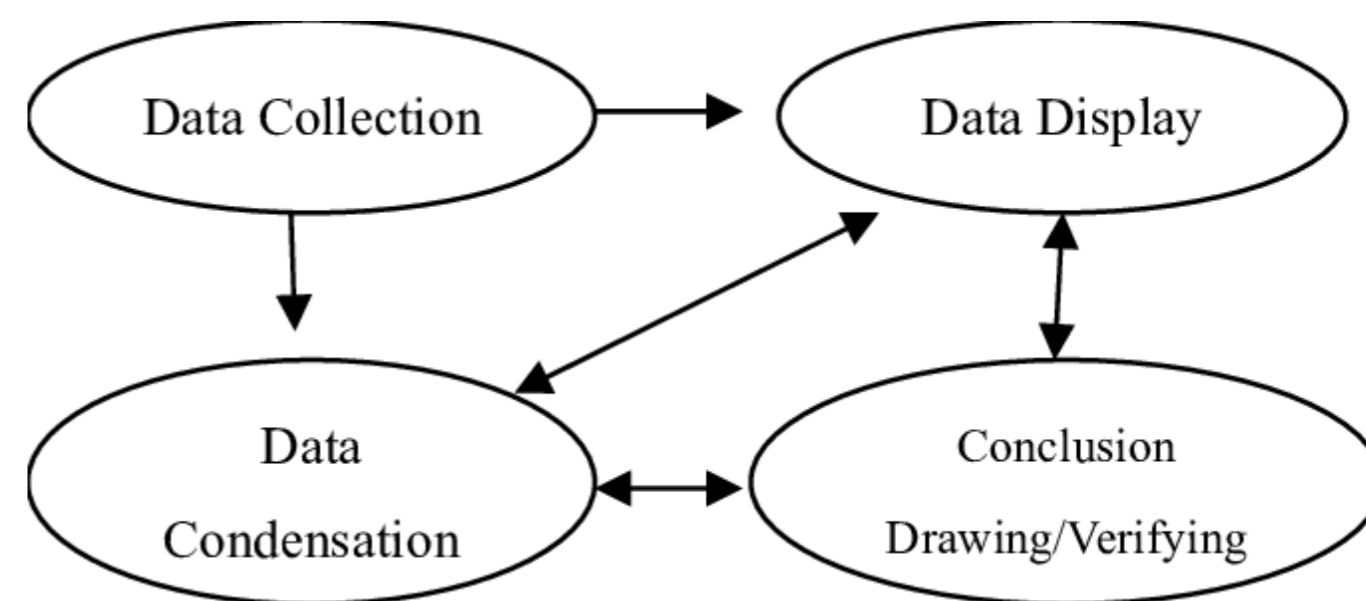
2. **Model Data (Data Display)**

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk: uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya. Miles dan Huberman (1984) menyatakan: "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the pas has been narative tex*" artinya: yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif.

3. **Penarikan Kesimpulan**

(Conclusion)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).



Gambar 3.1.
Teknik Analisis Data Miles dan Huberman

HASIL PENELITIAN

Peran Komite Sekolah sebagai Penghubung antara Sekolah dengan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program SMPN 1 Banyuasin 2, Kabupaten Banyuasin.

Hubungan Sekolah dengan Masyarakat dalam Pengadaan Dana

Penghubung antara sekolah dengan masyarakat salah satunya adalah berkomunikasi secara langsung agar terciptanya lingkungan sekolah yang efektif dan efisien. Melakukan hubungan dengan masyarakat baik itu dari berbagai perorangan, kelompok, dan kemasyarakatan untuk penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan

pembelajaran yang bermutu.

Dengan adanya sosialisasi yang di sampaikan oleh pihak sekolah dan pengurus komite kepada masyarakat dan orang tua siswa mengenai program komite sekolah yang dibuat oleh sekolah serta dimusyawarakkan dengan pengurus komite maka semua yang dibutuhkan oleh sekolah dapat terpenuhi walau belum sepenuhnya.

Hubungan Sekolah dengan Masyarakat dalam Pembangunan Sekolah

Kerja sama antara sekolah dengan masyarakat dan orang tua siswa sangat mempengaruhi proses pendidikan anak didika dan pengembangan sekolah. Melakukan kerja sama dengan masyarakat baik perorangan, organisasi

pemerintah dan kemasyarakatan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dengan cara membina hubungan dan kerja sama yang harmonis dengan seluruh yang terkait didalam pendidikan di sekitar sekolah.

Mediator/penghubung antara sekolah dengan masyarakat merupakan kesatuan untuk bekerja sama dalam meningkatkan jenjang pendidikan pada suatu sekolah yang ada. Hal ini diharapkan agar supaya sekolah dapat memiliki tujuan antara lain dapat memberikan informasi tentang tujuan program serta kebutuhan sekolah kepada masyarakat. Kemudian juga memberikan penerangan kepada sekolah tentang kebutuhan, harapan dan tuntutan masyarakat yang ditujukan kepada sekolah. Pelaksanaan kegiatan komite sekolah di SMPN 1 Banyuasin 2 Kabupaten Banyuasin didukung oleh dokumentasi berupa melalui hubungan sekolah dengan masyarakat seperti rapat komite sekolah antara sekolah dengan masyarakat.

Setiap melakukan pembentukan komite pada sekolah tentunya terlebih dahulu menentukan strategi serta cara yang digunakan dalam membuat hubungan dan komunikasi yang baik antara sekolah dengan masyarakat atau

dengan orang tua siswa. Komunikasi biasanya yang berisi hal-hal yang positif dalam suatu sekolah. Komunikasi yang baik adalah komunikasi terhadap seseorang yang dapat menumbuhkan kemauan dan semangat kerja yang baik disekolah seperti adanya bentuk kerjasama baik disekolah maupun di masyarakat.

Komunikasi seseorang biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Komunikasi yang melekat pada masing-masing orang tersebut dapat memberikan dampak bagi pertumbuhan kepribadian yang baik. Oleh karena itu, dengan komunikasi seseorang akan terbiasa bersosial dengan individu maupun dengan kelompok dan kebiasaan itu lama kelamaan akan masuk ke dalam dirinya serta berperan dalam membangun hal-hal yang baik.

Faktor Pendukung dan Penghambat Peranan Komite dalam Pembangunan Prasarana di SMPN 1 Banyuasin 2 Kabupaten Banyuasin

Peran komite sekolah harus dikembangkan dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat. Salah satu bentuk perkembangan komite sekolah adalah peran dalam pelaksanaan secara terstruktur dan konstitensi. Melalui

peran komite sekolah yang tinggi pelaksanaan suatu hubungan dapat mencapai maksud dan dapat dirasakan manfaatnya oleh pihak sekolah dengan masyarakat.

Beberapa faktor yang dirasakan sangat mendukung Peran komite dalam Pembangunan Prasarana SMPN 1 Banyuasin 2 Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut:

- 1) Tingginya partisipasi dari wali murid terhadap pembangunan prasarana SMP Negeri 4 Kecamatan Air Sugihan. Besarnya dukungan ini dapat dibuktikan dengan adanya pembangunan sarana-prasarana sekolah untuk memperlancar setiap kegiatan-kegiatan SMPN 1 Banyuasin 2 Kabupaten Banyuasin.
- 2) Ketersediaan sumber dana pembiayaan pendidikan Amanat UU Nomor 20 tahun 2003 yaitu Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bentuk pencapaian mutu pendidikan secara optimal sangat menunjang kinerja

komite sekolah dalam melaksanakan perannya dalam pembangunan sarana dan prasarana sekolah. Khususnya pendidikan dasar dan menengah di kelola langsung oleh pemerintah kabupaten/kota dan dimuat dalam APBD yang didanai oleh APBN.

Disamping faktor pendukung, juga ada faktor penghambat yang dirasakan dapat mengurangi partisipasi masyarakat antara lain:

- 1) Transparansi Anggaran Akuntabilitas dari suatu penyelenggaraan pendidikan sangatlah penting. Kebijakan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh sekolah sangat penting bagi peningkatan kepercayaan masyarakat. Jika hal ini tidak terlaksana dengan baik, dapat menimbulkan potensi kecurigaan dari masyarakat tentang tata kelola keuangan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah terhadap dana/jasa yang telah dikumpulkan dari masyarakat.
- 2) Belum maksimalnya partisipasi masyarakat Sungsang IV, Kec. Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin dalam membangun prasarana di SMPN 1 Banyuasin 2 Kabupaten Banyuasin.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil penelitian menjelaskan bahwa: Peran Komite Sekolah dalam pembangunan prasarana pendidikan di SMPN 1 Banyuasin 2 Kabupaten Banyuasin antara lain: sebagai pendukung pembangunan prasarana Di SMPN 1 Banyuasin 2 Kabupaten Banyuasin dalam bentuk Dana, pikiran, dan pengelolaan sarana prasarana, sebagai pengontrol, dalam pengawasan pembangunan gedung, memeriksa pengelolaan keuangan perlu dioptimalkan terutama dalam pengadaan sarana dan prasarana dan dana. peran sebagai penghubung antara sekolah dengan masyarakat dalam pengadaan sarana prasarana sekolah dan dana juga masih harus dioptimalkan. Faktor pendukung peran komite sekolah dalam pembangunan prasarana pendidikan di SMPN 1 Banyuasin 2 Kabupaten Banyuasin adalah tingginya partisipasi dari wali murid terhadap pembangunan prasarana SMPN 1 Banyuasin 2 Kabupaten Banyuasin. Faktor Penghambat Peran Komite Sekolah dalam pembangunan prasarana pendidikan di SMPN 1 Banyuasin 2 Kabupaten

Banyuasin antara lain belum maksimalnya partisipasi masyarakat Sungsang IV, Kec. Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin dalam membangun prasarana di SMPN 1 Banyuasin 2 Kabupaten Banyuasin.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Perlu ditingkatkan sosialisasi peran komite kepada masyarakat luas agar setiap wali siswa senantiasa aktif hadir untuk mengikuti rapat komite jika mendapat undangan rapat komite.
- 2) Bahwa sumbangan yang diminta komite sekolah bukanlah pungutan yang bersifat memaksa, melainkan sumbangan yang sifatnya sukarela.
- 3) Bila komite sekolah menekan untuk meminta sumbangan yang menentukan tariff nominalnya, maka berarti kegiatan tersebut adalah illegal yang berarti perbuatan tersebut adalah bentuk pungli dan dapat diancam dengan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Arifin, M dan Barnawi. 2012. *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Asmani, Jamal Ma'mur. 2011. *Manajemen Pengelolaan dan Kepemimpinan Pendidikan Profesional*. Yogyakarta: Diva Press.
- Danim, Sudarman. 1994. *Media Komunikasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamalik. 1986. *Media Pendidikan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hillery, George Jr. 1955. "Definitions of Community: Areas of Agreement." *Rural Sociology*
- Imron, Ali. 2002. *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indriyanto, 2009. *Panduan Penyelenggaraan Kantin Kejuruan SMA/SMK/MA, Depdiknas*.
- Kasan, Tholib . 2000. *Teori dan Aplikasi Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Studia Press.
- Mulyasa, E. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa. 2004. *Menjadi Kepala Sekolah profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyasa. 2011. *Manajemen dan Kepemimpinan kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nawawi, Hadari. 1987. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Universitas Gajah Mada. Pers. Yogyakarta
- Sagala, Syaiful. 2008. *Adimistrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Siti Irene, Astuti Dwiningrum. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal:

- Abdul Basith dan Indriana Rahmawati. 2020. *Kontribusi Kinerja Komite Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan*. Vol. 5 No. 1 Juni 2020 J-MPI homepage: <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jmpi/index>.
- Alton Mataputun. 2020. *Implementasi Tugas Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan Di Sma Negeri 2 Kabupaten Sarmi*. Jurnal Pengelolaan Pendidikan JUNI 2020 Volume 1 (1): 10–21.
- Azwarita. *Peran Komite Sekolah Dalam Aktualisasi Organisasi Sekolah*
- Hendri Abdul Qohar. 2018. *Manajemen Komite Sekolah Sebagai Badan Pendukung (Supporting Agency)*

- Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Slb Kabupaten Garut Dan Kabupaten Sumedang*. Inclusive: Journal of Special Education Volume IV Nomor 1 - Februari 2018 pISSN 2502-437X
- Nili, Hayani. 2015. *Peran Komite Sekolah Dalam Pembiayaan Pendidikan Manajer Pendidikan*, Volume 9, Nomor 2, Maret 2015, hlm. 315-327
- Nola Safitri. *Peran Komite Sekolah Dalam Pengadaan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Di Sekolah*. Norkhalisah, Putri Nova Amanda, Risma Dayanti. *Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Di Sekolah Inklusi SDN Sungai Andai 3 Banjarmasin*
- Sarno Hanipudin, Zulaekha. 2020. *Peran Komite Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah Di MI Ma'arif 03 Limbangan Cilacap*. Jurnal Pendidikan Islam Vol.6, No.2, Desember 2020, h. 65~74 ISSN 2088-690X
- Selvi Mayarani, Desi Nurhikmahyanti. *Peran Komite Sekolah Dalam Pengadaan Sarana Dan Prasarana di SD Negeri Pucang IV SIDOARJO*. Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan, Vol. 4No. 4, April 2014, hlm. 163-176
- Susi Herlinda. 2017. *Peran Komite Sekolah Terhadap Kinerja Guru Di Tk Aisyiyah Ii Kota Pekanbaru*. Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol 1, No 1, Oktober 2017.